



**Buletin**

Edisi, 294  
April 2019

# Isen Julang

Buletin Pemerintah Kalimantan Tengah



**Pelindung :**

Gubernur Kalimantan Tengah

**Penasehat :**

Sekretaris Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pengarah :**

Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

**Penanggung Jawab:**

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi  
Publik Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pemimpin Redaksi:**

Kepala Bagian Penyaringan Informasi  
dan Publikasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Pemerintahan dan Umum pada Biro  
Protokol dan Penyaringan Informasi  
dan Publikasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

**Wakil Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Media dan  
Dokumentasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Koordinator Distribusi :**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Ekonomi, Pembangunan dan  
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Staf Pelaksana :**

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,  
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito  
Zuares

**Alamat Redaksi :**

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya  
Telp/Fax (0536) 4200241

**Ijin Penerbitan Khusus**

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandara  
Tjilik Riwut Palangka Raya\_\_\_3

Anjongsana Gub/Wagub dan Sejumlah Pimpinan  
Instansi Vertikal Ke Sejumlah LKS Di Palangka Raya  
Dalam Rangka HUT Kalteng 2019\_\_\_4

Gub Kalteng : Pelayanan Birokrasi Harus Didukung  
PNS Berkarakter dan Kompeten\_\_\_5

Gub Kalteng : Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Dalam  
Menangani Masalah Sosial\_\_\_6

Gub Kalteng : Pengembangan SDM Perlu Koordinasi  
dan Kolaborasi\_\_\_7

Gubernur Minta BPKP Kalteng Terus Mengoptimalkan  
Fungsi Pengawasan\_\_\_8

Gub Kalteng Tegaskan Kabupaten/Kota se-Kalteng  
Segera Terapkan ASB dan Aplikasi E-Budgeting\_\_\_9

Gubernur Kalteng : Camat Ujung Tombak Pelaksanaan  
Tugas Umum Pemerintahan\_\_\_10

Brunei Darussalam Lirik Peluang Investasi Di  
Kalteng\_\_\_11

Gub Kalteng Minta Bupati/Walikota Terus  
Meningkatkan Nilai Investasi\_\_\_12

Gubernur Minta Bupati dan Walikota se-Kalteng  
Memaksimalkan Pembangunan dan Perawatan  
Infrastruktur\_\_\_13

Mendag Kunjungi Palangka Raya, Pantau Kestabilan  
Harga Pangan Jelang Puasa\_\_\_14

Pemprov Kalteng Antisipasi Lonjakan Harga  
Kebutuhan Pokok Jelang Idul Fitri 2019\_\_\_15

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Buka Kalteng Quality  
Expo 2019\_\_\_16

Gubernur Sugianto Ajak Masyarakat Kalteng  
Budayakan Gotong Royong\_\_\_17

Ketua TP PKK Kalteng Ny.Ivo Sugianto Sabran :  
Kapasitas Manajemen Kelembagaan PKK Perlu  
Ditingkatkan\_\_\_18

Palangka Raya Juara Umum STQ XXII Tingkat Provinsi  
Kalteng 2019\_\_\_19

## Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

Biro.PKP - Palangka Raya. Satu lagi proyek strategis nasional rampung dibangun di Kalimantan Tengah oleh PT. Angkasa Pura II yaitu terminal baru Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk mengantisipasi meningkatnya arus barang dan penumpang melalui pelayanan publik yang semakin baik di bidang transportasi udara.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengakhiri lawatannya di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur langsung mengunjungi Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk meresmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya tersebut, Senin sore (08/04/2019).

Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran bersama Ketua TP PKK Provinsi Ibu Ivo Sugianto Sabran. Setelah prosesi penyambutan secara adat yang dimeriahkan dengan tarian selamat datang khas Dayak, Presiden Jokowi meninjau berbagai fasilitas yang tersedia di terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya ini.

Seusai meninjau fasilitas terminal bandara, Presiden Jokowi kemudian meresmikan terminal baru Bandar Udara Tjilik Riwut tersebut yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirine. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Terminal (baru) Bandar Udara Tjilik Riwut saya nyatakan diresmikan", ucap Presiden Jokowi.

Pembangunan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya di atas lahan seluas 29.124 meter persegi ini memakan waktu sekitar 4,5 tahun dengan total dana APBN mencapai Rp 700 miliar dan mampu melayani 2.200 penumpang pesawat terbang tiap harinya.

Terminal baru ini jauh lebih luas dibandingkan terminal lama seluas 5.000 meter persegi dan hanya mampu melayani sekitar 600 penumpang setiap harinya. "Pembangunan Bandar Udara Tjilik Riwut yang telah kita kerjakan hampir 4,5 tahun telah diselesaikan. Ini menyangkut anggaran kurang lebih

700 miliar rupiah yang semuanya dibebankan di anggaran APBN kita, baik itu untuk pembangunan terminal, taxi way maupun untuk perpanjangan runway. Dan dari sebelumnya yang kurang lebih 5.000 meter persegi, sekarang ini totalnya menjadi 29.000 meter persegi, artinya 6 kali lipat sekarang ini, besar sekali," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap ke depan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah yang dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan signifikan. "Kita harapkan Bandar Udara Tjilik Riwut (terminal baru) ini bisa menjadi sebuah motor pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dan itu terlihat dari jumlah penumpang yang meningkat sangat tinggi dan juga pertumbuhan kargo yang juga sangat tinggi. Yang jelas ini adalah sebuah persiapan mengantisipasi pertumbuhan penumpang, pertumbuhan kargo yang di Kalimantan Tengah ini peningkatannya sangat tinggi," tutur Presiden Jokowi.

Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan penambahan rute penerbangan baru, Presiden Jokowi dengan lugas mengatakan otomatis saja jika penumpangnya tinggi, "Ya nanti kalau pertumbuhan penumpangnya tinggi, tentu saja otomatis akan semakin banyak penerbangan dari dan ke Kalimantan Tengah", tegas Jokowi.

Peresmian terminal baru Bandara Tjilik Riwut itu juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Mohamad Awalludin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota DPR RI Hamdhani, Wakil Gubernur Habib H. Said Ismail, Pangdam XII/Tanjung Pura Mayjen TNI Herman, Kapolda Kalteng Irjen. Pol. Anang Revandoko, Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak, sejumlah Bupati dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin serta ratusan warga masyarakat yang sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi.\*\*\*



## Anjongsana Gub/Wagub dan Sejumlah Pimpinan Instansi Vertikal Ke Sejumlah LKS Di Palangka Raya Dalam Rangka HUT Kalteng 2019.

Palangka Raya – Biro PKP. Peringatan Hari Jadi Ke-62 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di meriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha antara lain Pameran, Lomba dan Anjongsana Ke Lembaga Kesejahteraan Sosial di Palangka Raya.

Salah satu kegiatan adalah Anjongsana Ke Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti yang dilakukan Wakil Gubernur Kalteng Habib H.Said Ismail beserta sejumlah pimpinan Lembaga/Instansi terkait ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Amin di Jalan Yakut Palangka Raya, Selasa (30/04/2019) sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pimpinan LKSA Darul Amin Palangka Raya.

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya disampaikan Wakil Gubernur Habib H.Said Ismail ketika melakukan Anjongsana ke LKSA Darul Amin Palangka Raya mengatakan sewajarnya kita mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pejuang yang telah memperjuangkan berdirinya provinsi Kalimantan Tengah. “Marilah kita tingkatkan nilai-nilai kesetiakawanan, kegotongroyongan dan restorasi sosial serta berbagi dan membantu kepada sesama yang memerlukan khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh warga Kalimantan Tengah”, beber Sugianto Sabran.

Gotong royong dan berbagi kepada sesama merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku dan agama untuk mencapai tujuan negara yang luhur. “Berbagi itu



indah, berbagi itu ibadah, berbagi itu pahala, tentunya dengan keikhlasan”, tegas gubernur.

Anjongsana dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-62 Provinsi Kalteng tahun 2019 dilaksanakan pada 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Panti Sosial di wilayah Kota Palangka Raya sekaligus silaturahmi pejabat pemerintah dengan para penyandang masalah

kesejahteraan sosial di lingkungan LKSA yang dikelola pemerintah dan swasta serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada penghuni LKS.

Anjongsana tersebut dibagi ke dalam 10 rombongan masing-masing Rombongan I dipimpin Gubernur Kalteng H.Sugianto anjongsana ke LKSA Berkah, Rombongan II dipimpin Wagub Habib H. Said Ismail ke LKSA Darul Amin, Rombongan III dipimpin Ketua DPRD Kalteng ke LKSA Al Amin, Rombongan IV dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng ke LKSA Bina Sejahtera, Rombongan V dipimpin Kapolda Kalteng ke Panti Sosial Bina Remaja Majar Tabela, Rombongan VI dipimpin Danrem 102 Panju Panjung ke Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea, Rombongan VII dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng ke LKSA Ayah Bunda, Rombongan VIII dipimpin Kepala BPK Perwakilan Kalteng ke LKSA El Ministry, Rombongan IX dipimpin Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng ke LKS Agape dan Rombongan X dipimpin Rektor IAIN Palangka Raya ke LKSA Darul Tazkiyah Palangka Raya.\*\*\*



## Gub Kalteng : Pelayanan Birokrasi Harus Didukung PNS Berkarakter dan Kompeten.

Palangka Raya – Biro PKP. Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan Visi Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang ditandai dengan kekayaan alam melimpah, potensi sumber daya manusia serta peluang investasi dan demokrasi yang relatif stabil.

Eksistensi Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pengolahan prakondisi tersebut. “Sejumlah keputusan strategis mulai dari formulasi kebijakan sampai pada implementasinya dalam berbagai sektor pembangunan memerlukan sosok PNS yang bisa memberikan pelayanan berkualitas yaitu mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien”, jelas gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III se-Kalteng di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin pagi (20/04/2019).

Gubernur Sugianto Sabran menegaskan dalam memasuki Era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada Pola Digital

Ekonomiy, Artificial Intelligence, Big Data dan Robotic yang dikenal dengan fenomena Disruptive Innovation yang penuh tantangan tersebut, menuntut perbaikan pelayanan publik dengan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada aparatur pemerintah melalui pelatihan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menanam karakter aparatur pemerintah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Provinsi Kalteng memiliki potensi sangat besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi tempat investasi. Salah satu daya tarik yang harus disiapkan adalah keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Kalimantan Tengah sehingga tenaga kerja dapat terserap dan tertampung. “Saya mengajak seluruh CPNS hasil seleksi tahun 2018 tetap menjaga keamanan dan ketertiban iklim pemerintahan dalam rangka membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah”, kata gubernur.

Untuk mencapai sasaran tersebut 3294 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III hasil seleksi CPNS Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng tahun 2018 diprogramkan

mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah secara terintegrasi dalam rangka mengembangkan kompetensi CPNS.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalteng Sri Widanarni menjelaskan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III se-Kalteng secara integrasi ini dimaksudkan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme, kebangsaan berkarakter kepribadian unggul, bertanggungjawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

Pelatihan Dasar bagi CPNS tersebut selain membangun karakter juga bertujuan membangun kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. “Indikasinya pelayanan masyarakat yang profesional antara lain mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya”, terang Sri Widanarni.\*\*\*



## Gub Kalteng : Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Dalam Menangani Masalah Sosial

Palangka Raya – Biro PKP. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah multi dimensi karena menyangkut permasalahan kebutuhan material, spiritual dan sosial sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan dan sinerjitas di antara para pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pilar-Pilar Sosial dan Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengemukakan hal tersebut dalam sambutannya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Bimbingan Teknis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (04/04/2019).

Perwujudan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha”, tegas Sugianto Sabran.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau Pilar-Pilar Sosial misalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Tarunan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan ujung tombak penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan dikriminasi.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah kemampuan yang ada dalam

masyarakat yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami sadar dalam melaksanakan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tidak bisa berbuat sendiri. Kehadiran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Karang Taruna sangat penting dan strategis karena menghadapi permasalahan di masa mendatang tidak lebih mudah”, jelas Gubernur.

Globalisasi tidak bisa dihindari, namun jangan sampai meninggalkan akar budaya bangsa. “Untuk itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau Pilar-Pilar Sosial harus mengambil peran yang membawa nilai-nilai kebajikan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, etos kerja yang produktif, disiplin dan tetap memelihara semangat gotong royong”, terang Gubernur.

Terlebih lagi era milenial yang ditandai dengan revolusi 4.0 diharapkan bangsa lebih maju sehingga dapat membawa dampak yang lebih positif. Untuk itu sangat penting berpegang teguh pada jati diri bangsa agar tidak terbawa arus negatif budaya asing.

Kehadiran Pilar-Pilar Sosial dapat menjadi jembatan kemajuan budaya Indonesia di dalam kehidupan masyarakat. Dalam era

keterbukaan menjadi keharusan sikap cekatan membangun jejaring kerja dan bertukar informasi untuk membangun aliansi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam menangani masalah sosial. “Kerja sama yang kuat antara pemerintah, Pilar-Pilar Sosial dan masyarakat akan dapat membendung ide-ide negatif yang dapat memecah belah bangsa”, ujar Sugianto Sabran.

Karena itu, Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik Bimbingan Teknis PSKS tersebut untuk menguatkan pengelolaan administrasi dan manajemen kelembagaan serta organisasi Pilar-Pilar Sosial yang ada di Kalimantan Tengah.

Tingginya kemitraan PSKS atau Pilar-Pilar Sosial dalam mencegah masalah sosial dan melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka kemitraan dan kerja sama dengan Pilar Sosial dapat diperluas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap komitmen seluruh Pilar Sosial untuk terus berupaya menjaga keutuhan NKRI, mengingat Pilar Sosial menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus garda terdepan dalam menangani permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat”, beber Gubernur.

Diharapkan seluruh Pilar Sosial yang ada bisa merespon dengan cepat berbagai permasalahan sosial sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.\*\*\*



## Gub Kalteng : Pengembangan SDM Perlu Koordinasi dan Kolaborasi.



Palangka Raya – Biro PKP. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kawah cadradimuka dalam membentuk ASN yang handal, kompeten, berintegritas, berdaya saing tinggi serta mampu mengikuti perkembangan di era digitalisasi dan berkinerja tinggi.

Demikian Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Rakor Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dan Diklatpim Tingkat III dan IV Tahun Anggaran 2019 se-Kalimantan Tengah di Aula BPSDM Provinsi Kalteng, Jumat (05/04/2019).

Menurut gubernur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan

Tengah sebagai Lembaga Pelatihan terakreditasi dan instansi penjamin mutu Diklat harus mampu melaksanakan kegiatan dengan mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka menjamin seluruh proses penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar mutu. “Pengembangan SDM di Provinsi Kalteng membutuhkan Koordinasi dan Kolaborasi antara Pemprov Kalteng, Kabupaten dan Kota untuk menghasilkan SDM yang profesional dan kompeten”, tegas gubernur.

Dijelaskan, BPSDM sebagai Lembaga Diklat Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa berdiri sendiri sehingga diharapkan penyelenggaraan Rakor ini dapat bersama-sama memikirkan solusi terkait pengembangan Sumber

Daya Manusia ASN terutama dalam rangka penyelesaian Pelatihan Dasar CPNS tahun 2019 yang secara keseluruhan berjumlah 3.467 orang. “Melihat jumlah yang sangat besar, ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama untuk bisa menyelenggarakan pelatihan tersebut. Tahun 2019 kita juga menjadi tuan rumah SINOPADIK dan Jambore Inovasi Nusantara (JOIN US) 2019. Diharapkan peran serta Kabupaten dan Kota mempersiapkan Alumni Diklatpim untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut”. ungkap Sugianto Sabran.

Oleh karena itu diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kepekaan dan kepedulian melalui sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). “Saya mengucapkan terimakasih dan mengharapkan agar selalu menjaga kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga proses penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib serta menghasilkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian permasalahan”, ujar gubernur. \*\*\*



## Gubernur Minta BPKP Kalteng Terus Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan

Palangka Raya – Biro PKP. Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah diserahkan-terimakan dari Pejabat Lama Herman Hermawan kepada Pejabat Baru Setia Pria Husada di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng dihadiri Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran beserta Unsur Forkopimda dan Deputi BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto, Rabu pagi (24/04/2019).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menilai pergantian pimpinan organisasi birokrasi adalah suatu proses alamiah dan bagian dari dinamika organisasi yang terbuka dan dinamis sehingga berimplikasi terjadinya proses pergantian pimpinan secara periodik dan berkesinambungan. “Pengucapan sumpah dan serah terima jabatan Kepala Badan BPKP Provinsi Kalteng merupakan momentum strategis bagi segenap jajaran BPKP. Selain sebagai pengembangan karir aparat, juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja serta memantapkan koordinasi tugas dengan seluruh instansi di wilayah kerjanya”, jelas Sugianto Sabran.

Perwakilan BPKP sebagai auditor internal pemerintah di daerah diminta senantiasa memantapkan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan dengan cara mengembangkan sinergi secara optimal dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan sebagai dukungan bagi proses pengambilan kebijakan. “Apresiasi kami sampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng karena telah berperan penting dalam membantu meningkatkan kinerja Pemrov maupun Pemkab/ Pemkot se-Kalteng khususnya dalam pengelolaan keuangan



daerah”, ujar gubernur.

Sugianto Sabran mengharapkan pergantian kepemimpinan BPKP Kalteng bisa berperan sebagai Auditor sekaligus Partner dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara dan daerah melalui pemantapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dijelaskan, Pemrov Kalteng telah berhasil meraih opini WTP empat kali berturut-turut dan berharap untuk LKPD tahun 2018 tidak boleh turun. Karena itu kawalan dan masukan dari BPKP sangat diperlukan. “Saya minta peran optimal dari BPKP dalam mendorong kinerja pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya sehingga seluruh Pemerintah Kabupaten dan kota di Kalteng meraih Opini WTP”, kata gubernur.

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai prestasi bersama dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan semua komponen dan pemangku kepentingan terus memantapkan koordinasi dan sinergitas.

“Kita akan mampu melaksanakan seluruh

program pembangunan sesuai dengan prinsip Good Governance serta mewujudkan Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng Berkah. Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng menjadi yang terdepan dalam mewujudkan kondisi tersebut sehingga pada akhirnya dengan optimalisasi fungsi pengawasan, kita akan mampu melaksanakan seluruh program pembangunan sesuai dengan prinsip Good Governance serta mewujudkan Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”, imbuh Sugianto Sabran.\*\*\*





## Gub Kalteng Tegaskan Kabupaten/Kota se-Kalteng Segera Terapkan ASB dan Aplikasi E-Budgeting.

Palangka Raya – Biro PKP. Pengelolaan keuangan daerah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang berpengaruh terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Analisa Standar Belanja (ASB) dan E-Budgeting merupakan alat bantu proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan penganggaran hingga pertanggungjawaban anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta menjaga pengendalian dan konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Analisa Standar Belanja sebanyak 44 ASB. Karena itu diharapkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengingatkan kepada jajarannya agar wajib menerapkan ASB tersebut dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sapto Nugroho pada pembukaan Sosialisasi

Analisa Standar Belanja dan E-Budgeting Tahun 2019 di Palangka Raya, Rabu (10/04).

“Diharapkan Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar segera menerapkan ASB dan Aplikasi E-Budgeting ini di Kabupaten dan Kota masing-masing mengingat ASB dan E-Budgeting sangat penting”, tegas Gubernur Kalteng.

Keunggulan dari Analisa Standar Belanja dan E-Budgeting tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada di daerah antara lain Sistem Perencanaan Daerah (e-Planning) dan Sistem Perencanaan Barang Daerah (e-Reporting) serta menyimpan catatan proses yang dilakukan oleh user (Log File/History) yang terdapat dalam menu pembahasan rancangan KUA-PPAS antara OPD dengan TAPD dan TAPD dengan DPRD. Selain itu pembahasan rancangan APBD antara OPD dengan TAPD dan TAPD dengan DPRD secara elektronik tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi agar menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nuryakin mengatakan sosialisasi analisis standar biaya dan E – Budgeting ini dimaksudkan untuk mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam proses penyusunan anggaran serta

bertujuan meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJMD, keakuratan nilai rekening dan akuntabilitas alokasi belanja.

Nuryakin menjelaskan pemerintah provinsi Kalteng sejak 2017 sampai saat ini telah menjalin kerjasama dengan Universitas Gajah Mada di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya dalam penyusunan ASB.

“Dari kerjasama tersebut telah tersusun 40 ASB dengan perincian untuk tahun 2017 sebanyak 20 ASB dan 2018 tercatat 20 ASB, sedangkan rata-rata kegiatan yang akan di ASB untuk 1 provinsi sekitar 80-90 ASB. Proses penganggaran secara e-planning dan dan e-budgeting ASB merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus diterapkan di semua Pemerintah Daerah di Indonesia agar dapat segera diterapkan”, jelas Nuryakin.

Sosialisasi Analisa Standar Belanja dan E-Budgeting itu menghadirkan Narasumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif dan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ehrmann Suhartono. Sosialisasi tersebut diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur Badan Anggaran DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah serta OPD Pemerintah Provinsi Kalteng.\*\*\*



## **Gubernur Kalteng : Camat Ujung Tombak Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.**

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

Penduduk miskin dan rentan menjadi prioritas dalam pelayanan dasar sehingga dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang holistik, integratif, tematik dan tepat secara lokus dari Kementerian/ Lembaga Non-Pemerintah lainnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut melalui proses pengendalian perencanaan dan penganggaran yang kontribusi programnya dapat dipetakan dan diharmonisasi sampai dengan lokus daerah yang spesifik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

“Pemerintah daerah dan jajarannya wajib mendukung pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dasar yang lokusnya berada di tingkat kecamatan karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pengaturan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat”, tegas gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Plh. Sekda Kalteng Sapto Nugroho ketika membuka Rapat Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam rangka implementasi Permendagri Nomor : 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Senin (08/04/2019).

Dikemukakannya, Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. “Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Camat dengan sendirinya mempunyai kewenangan Atributif dan Delegatif”, beber gubernur.

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya di Kecamatan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa dan kegiatan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan kewenangan delegatifnya maka Bupati/Walikota perlu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. “Hal-hal yang saya kemukakan itu menunjukkan arti pentingnya penguatan peran Kecamatan sebagai simpul koordinasi secara vertikal”, terang Sugianto Sabran.

Pemerintah dalam tahun 2019 telah membuat Program Dana Kelurahan untuk menunjang operasional di kelurahan. Dana Kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk Kelurahan dengan besaran anggaran yang berbeda dengan Dana Desa. Program ini muncul dari aspirasi

masyarakat yang berkembang setelah memperhatikan Program Dana Desa yang diluncurkan mulai tahun 2015 dan telah membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. “Pada prinsipnya Dana Kelurahan sama dengan Dana Desa yakni untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut”, tegas gubernur.

Rapat Koordinasi itu bertujuan untuk mengetahui secara langsung bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten dan Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah serta mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan khususnya dalam pelaksanaan dan penyerapan Dana Kelurahan tahun 2019.

Rakor Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan tersebut juga untuk menyamakan persepsi, meningkatkan motivasi dan kapasitas aparatur pemerintahan khususnya Camat dan Lurah dalam menangani penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan serta menghimpun hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang intilijen dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman/gangguan terhadap keamanan nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah serta mengukur sampai sejauh mana upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga.

Rakor tersebut diikuti 303 orang peserta terdiri Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten dan Kota se-Kalteng, 136 Camat dan 139 Lurah se-Kalteng.\*\*\*

## Brunei Darussalam Lirik Peluang Investasi Di Kalteng.



Palangka Raya – Biro PKP. Tim BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD Brunei Darussalam menjajaki peluang investasi jangka panjang dalam berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Tengah dengan proyeksi investasi sebesar USD 10 miliar.

Pimpinan Tim BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD Brunei Darussalam Pangiran Yura Kesteria PSN Haji Md Yusuf menegaskan pihaknya siap merealisasikan investasi tersebut. “Kami akan merealisasikan di bidang infrastruktur, pertanian, perikanan, perindustrian, listrik, jalan raya dan bidang lainnya”, jelas Haji Md Yusuf dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Selasa (02/04/2019).

Menurut Haji Md Yusuf, hal tersebut kembali kepada kemauan masyarakat dan pemerintah provinsi Kalteng. Pihaknya siap membantu di bidang teknologi

dan konstruksi dalam mencapai kepentingan bersama pihak swasta dan kerajaan Brunei Darussalam. “Ini membutuhkan waktu panjang, bukan pembangunan jangka pendek. Kami akan membantu sumber daya manusia dan meningkatkan pengetahuan masyarakat”, jelasnya.

Dijelaskan, Tim BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD Brunei Darussalam akan fokus mengelola investasi sebesar 10 miliar dollar AS pada sektor pertanian dan nilai investasi tersebut bisa bertambah sesuai dengan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah. “Dengan melakukan MoU ini akan menjadi suatu keyakinan bagi kami untuk menindaklanjuti kerjasama ke depan, paling lambat tiga tahun. Sebelumnya kami akan mengirimkan tim teknis pada sektor tertentu untuk meninjau teknologi apa saja yang diperlukan, termasuk soal tenaga kerja, listrik dan sebagainya”, beber Md Yusuf.

Selain investasi di sektor pertanian, pihak BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD

Brunei Darussalam juga melirik peluang investasi di bidang pariwisata, rumah sakit, sekolah dan universitas jika diperlukan di Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengapresiasi kedatangan tim dan rencana investasi dari pihak BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD yang merupakan gabungan 4 negara meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia tersebut. “Namun hal terpenting dan menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah memotong proses perijinan birokrasi agar tidak menjadi panjang dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat”, beber gubernur Kalteng tersebut.

Sugianto Sabran mengatakan investasi harus diberikan kemudahan-kemudahan mengingat banyak sektor yang akan dikembangkan seperti bidang energi kelistrikan, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Investasi di berbagai sektor tersebut memerlukan dukungan masyarakat dan pemerintah, tapi investor asing juga harus memperhatikan budaya lokal. “Jika ada yang ingin berinvestasi besar khususnya di bidang pertanian perlu kita dukung, asal tetap memperhatikan kearifan lokal budaya setempat serta untuk kemajuan masyarakat Kalteng”, tegas Sugianto Sabran.

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar untuk food estate dan luasan lahan akan ditambah lagi dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan ekonomi Kalteng melalui berbagai sektor pembangunan.

Pertemuan pemerintah provinsi Kalteng dengan Tim BIMP-EAGA Multipro Resources SDN BHD Brunei Darussalam tersebut juga diikuti sejumlah Bupati dan Kepala SOPD Provinsi Kalteng.\*\*\*

## **Gub Kalteng Minta Bupati/Walikota Terus Meningkatkan Nilai Investasi**

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 diprioritaskan pada bidang Insfrastuktur, Pendidikan, Kesehatan serta Perekonomian dalam arti luas. Guna mendukung hal tersebut pemerintah daerah terus mendorong dan meningkatkan nilai investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk tertentu terutama produk unggulan daerah.

“Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada komoditas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangatlah rentan terjadi perlambatan karena kondisi eksternal dan Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mengalami hal tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yakni 5,64 % dibandingkan 2017 sebesar 6,72 %”, jelas gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2020 di aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (08/04/2019).

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,17%. Capaian makro lainnya mencakup Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio tahun 2018 lebih baik dari capaian nasional.

Di Bidang Infrastruktur disebutkan Kalimantan Tengah telah melakukan terobosan strategis melalui Program Multiyears untuk pembangunan

dan peningkatan ruas jalan dan jembatan guna membuka isolasi daerah dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Kedepan pembangunan insfrastrutur tetap kita prioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pengembangan pelabuhan udara dan laut,” terang gubernur.

Demikian juga Bidang Pendidikan sejak 3 tahun terakhir provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan Bantuan Biaya Pendidikan (Bidik Misi Kalteng BERKAH) untuk jenjang S1, D4 dan D3 bagi Putera-Puteri Kalimantan Tengah yang berprestasi namun kurang mampu. Tahun 2019 disediakan bantuan BIDIK MISI KALTENG BERKAH untuk 5.000 mahasiswa masing-masing memperoleh Rp 2.500.000 per-orang.

Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 tahun terakhir juga telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tahun 2019 JKN Kalteng Berkah tercatat 90.582 jiwa dengan total nilai premi Rp 25 Milyar lebih serta memprogramkan pembanguna RS Pemerintah Kelas A melalui kerjasama dengan Badan Usaha.

Pada Musrenbang provinsi Kalimantan Tengah tersebut gubernur Sugianto Sabran juga menjelaskan berbagai kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan Pendapatan dan Belanja Daerah selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan berkisar Rp 500 Milyar lebih, Royalty Batubara dari 400 Milyar pada tahun 2015 naik menjadi Rp 2 Trilyun pada tahun 2018. “Hal tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan APBD Kalimantan Tengah yang melampaui target RPJMD”, ujarnya.

Namun diakui sampai saat ini 3 sektor unggulan Kalimantan Tengah yakni pertambangan,

perhutanan dan perkebunan dirasa masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melakukan terobosan dengan menerbitkan Pergub No. 16 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pihak Ketiga. “Diharapkan hasil sumbangan tersebut nantinya melalui APBD diperuntukkan membiayai pembangunan di bidang insfrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat”, beber Sugianto Sabran seraya memohon dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha dan Stakeholder sehingga Pergub tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Sugianto Sabran juga mengharapkan Bupati dan Walikota se-Kalteng terus mendorong peningatan investasi di daerahnya masing-masing untuk memperluas lapangan kerja dan terkait perijinan agar mengindari proses yang berbelit-belit serta meminta dukungan Pemerintah Pusat membantu pembangunan Kalimantan Tengah melalui Peningkatan Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Sumber Pendanaan lainnya.

Plh. Sekretaris Daerah Kalteng Supto Nugroho menjelaskan Musrenbang Provinsi Kalteng 2019 dimaksudkan melakukan Penajaman, Penyelerasan, Klarifikasi dan Kesepakatan terhadap Rancangan RKPD tahun 2020. Tujuannya untuk menyepakati permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota lingkup provinsi, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja.\*\*\*

## Gubernur Minta Bupati dan Walikota se-Kalteng Memaksimalkan Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran meminta seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Kalteng, Dinas dan Instansi beserta elemen terkait lainnya agar lebih memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang masih belum tuntas dikerjakan. Salain itu juga harus fokus memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan kemudahannya serta perbaikan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program-Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019 di Aula Utama Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/4/2019).

Sugianto Sabran juga mengharapkan para Bupati dan Walikota termasuk Dinas PU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng agar selalu berkoordinasi dalam pembangunan jalan. “Jangan sampai pembangunan jalan sudah selesai, tapi tidak bertahan lama sehingga jalanan rusak kembali”, tegas gubernur.

Wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas ini membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat. Namun APBD Kalteng baru mencapai Rp.5,45 triliun yang terdiri Belanja Langsung (BL) Rp. 2,79 triliun dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 2,66 triliun. “Dengan APBD yang terbatas, maka pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tentu tidak maksimal membangun sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat”, jelas Sugianto Sabran.

Berdasarkan perhitungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tergambar kebutuhan ideal dana setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat sebesar Rp.4 triliun lebih. Berdasarkan gambaran kondisi tersebut, maka pemerintah

provinsi Kalimantan Tengah berusaha mencari terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk meningkatkan besaran APBD Provinsi guna mengakomodir keperluan dana pembangunan tersebut.

Peningkatan pendapatan daerah harus dicapai demi Kemandirian Daerah agar ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. Untuk mencapai kemandirian daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat itu diperlukan berbagai solusi. “Terobosan Pemerintah Kalimantan Tengah untuk peningkatan pendapatan daerah adalah dengan sumbangan Pihak Ketiga melalui Peraturan Gubernur Nomor : 16 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”, terang Sugianto Sabran.

Ditegaskan, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga program dapat terlaksana dengan baik, tepat mutu, tepat waktu dan tepat volume sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya penyerapan Belanja Langsung sebagai upaya percepatan realisasi target kinerja pembangunan yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan”, kata Gubernur Kalteng tersebut.

Pembangunan infrastruktur juga harus menyentuh masyarakat di pedalaman. “Kita masih membutuhkan hibahan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pedalaman kabupaten, bukan hanya terfokus di daerah perkotaan saja. Kualitas infrastruktur jalan-jalan di daerah terpencil juga diharapkan mampu mendukung perekonomian masyarakat setempat”, ujarnya.

Pembangunan sektor pendidikan juga harus memperhatikan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan para guru honorer. “Terkait Guru-guru honorer yang berada dalam naungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, direncanakan tahun 2020 gaji para guru honorer wajib memenuhi standard angka UMP yang berkisar antara Rp 2.900.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- per-bulan dengan pembayaran gaji wajib setiap bulannya,” ungkap Sugianto Sabran.

Dijelaskan keberhasilan capaian kinerja 3 tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi 5,64 % tahun 2018, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 %.

Angka kemiskinan 5,10 %, lebih rendah dari capaian nasional yakni 9,66 %, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 70,42 dan untuk pertama kalinya IPM Kalteng masuk dalam kategori kelompok tinggi (70 – 80) dan gini ratio 0,342, lebih rendah dibanding dengan capaian nasional pada angka 0,384. “Keberhasilan capaian indikator makro pembangunan tersebut hendaknya dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi pada tahun 2019”, imbuhnya.

Pada Rakordal tersebut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga mengukuhkan Pengurus Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode tahun 2019 – 2022 yang diketuai Profesor Dr. Sulmin Gumiri, MSc. Diharapkan dengan terbentuknya Pengurus DRD ini mampu menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam memperkuat Kelitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan berkontribusi menyumbangkan ide/gagasan terkait IPTEK melalui kajian-kajian penelitian ilmiah serta membantu Kelitbang Daerah dalam menyusun Grand Design Kalteng 50 tahun ke depan.\*\*\*

## **Mendag Kunjungi Palangka Raya, Pantau Kestabilan Harga Pangan Jelang Puasa**

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah setiap tahun terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa dan Idul Fitri selalu memastikan kesediaan stok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga bahan pokok masyarakat di pasaran sehingga masyarakat tetap tenang menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam kunjungan kerjanya ke Palangka Raya hari Sabtu (13/04/2019) antara lain mengunjungi pasar tradisional Palangka Raya untuk mengecek langsung harga pangan terutama kebutuhan pokok yang dijual di pasar-pasar tradisional dalam keadaan stabil atau normal. “Dari pantauan ini terlihat harga bahan pokok pangan seperti daging ayam, telur, gula dan beras relatif stabil, bahkan ada yang dijual di bawah HET”, beber Enggartiasto Lukita.

Meskipun harga relatif stabil, namun diakui ada dua

komoditas yang mengalami kenaikan harga jual cukup signifikan yakni bawang merah dan bawang putih hingga mencapai harga Rp.45.000,- per-kilogram. “Untuk bawang putih dan bawang merah harganya memang masih tinggi, kita upayakan untuk diatasi”, tegas Mendag ketika meninjau pasar tradisional Palangka Raya.

Menurut Enggartiasto Lukita, pihaknya telah memerintahkan para importir bawang agar sesegera mungkin mengeluarkan stok dari gudang mereka sehingga tidak terkesan adanya penimbunan yang pada akhirnya seenaknya melakukan permainan harga.

Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga menjelang bulan Ramadhan.



“Untuk importir, termasuk importir bawang merah dan bawang putih, saya harap bisa mengeluarkan stok bawang dari gudang. Jangan sampai saat diperiksa nanti akan disebut sebagai penimbunan”, tegas Enggar.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menegaskan jika permintaan itu tidak diindahkan importir, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada importir bersangkutan yakni tidak boleh lagi mengimpor bawang.\*\*\*



## **Pemprov Kalteng Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Idul Fitri 2019.**

Palangka Raya – Biro PKP. Setiap datangnya Hari Besar Keagamaan selalu diiringi dengan terjadinya peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas bahan pokok sehingga sangat berpengaruh terhadap tingginya inflasi.

Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan menyebabkan sebagian besar kebutuhan bahan pokok masyarakat dipasok dari luar daerah Kalteng. “Kondisi yang perlu dilakukan antisipasi adalah kepadatan arus lalu lintas jalan yang seringkali menimbulkan terlambatnya pasokan sampai ke daerah tujuan dan menipisnya persediaan/stok pada tingkat agen, distributor dan pedagang besar”, tegas Asisten II Sekda Kalteng Nurul Edy ketika memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka menjaga ketersediaan stok/pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menghadapi Puasa dan Lebaran tahun 2019 di Palangka Raya, Kamis (11/04/2019).

Kelangkaan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat akan berdampak pada terjadinya fluktuasi harga. Kondisi tersebut perlu disikapi karena kenaikan



harga bahan pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Nurul Edy meminta pelaku usaha dapat melakukan antisipasi dan jika ada hambatan arus distribusi segera memberitahukan dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. “Saya minta kepada Kepala Dinas/Instansi terkait lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota agar selalu berkoordinasi untuk menjaga kecukupan stok bahan pokok serta keamanan dan kelancaran arus distribusi bahan pokok”, ujarnya.

Faktor ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak

terkait sehingga masyarakat yang akan menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dapat dengan tenang beribadah. “Saya menghimbau pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan di luar kewajaran dan semua pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalteng untuk mewaspadai hal tersebut”, kata Nurul Edy.

Bupati dan Walikota juga diminta untuk mengaktifkan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan menggelar Pasar Murah menjelang Hari Raya Idul Fitri melalui dinas/instansi yang membidangi perdagangan.

Rapat Koordinasi yang dihadiri Dinas/Instansi Perdagangan se-Kalteng, instansi terkait di tingkat provinsi, BUMN dan pelaku usaha perdagangan bahan pokok tersebut bertujuan menjaga ketersediaan stok, pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok masyarakat serta kesiapan daerah dalam mengantisipasi terjadinya kekurangan stok dan pasokan.

Selain itu juga sebagai langkah mengantisipasi gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang dan pada saat perayaan Idul Fitri 2019.\*\*\*



## Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Buka Kalteng Quality Expo 2019

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Kalteng Quality Expo Ke-12 tahun 2019 yang berlangsung mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2019 di Arena Pamerang Temanggung Tilung Palangka Raya.

Kalteng Quality Expo 2019 yang diikuti 132 stand termasuk 12 Stand Kabupaten/Kota se-Kalteng, 34 SOPD dan 9 Instansi Vertikal tersebut memamerkan berbagai jenis produk antara lain hasil kerajinan tangan (handicraft) dan produk hasil hutan seperti rotan dan karet serta produk kayu olahan seperti furniture dan produk unggulan lainnya dari Daerah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Kalteng Quality Expo 2019 di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, Senin siang (29/04/2019) mengatakan Kalteng Quality Expo ini sebagai ajang promosi yang efektif dan efisien pada waktu, tempat dan sasaran yang tepat dalam rangka meraih peluang ekspor dan investasi baru sekaligus memperlihatkan eksistensi dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan, penguatan citra perusahaan dan produk-produknya serta meraih calon mitra investasi dan perdagangan.

Selain itu Kalteng Quality Expo ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan produksi Indonesia khususnya sumber daya alam Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di pasar dalam dan luar negeri.

Gubernur mengharapkan Kalteng Expo 2019 tersebut dapat dipakai untuk menciptakan interaksi bisnis secara langsung bagi para pengusaha, pembeli, penyedia teknologi dan investor serta membangun komitmen dengan calon investor agar



tertarik menanamkan investasinya di Kalimantan Tengah. “Untuk itu aparat pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menyajikan data dan informasi untuk kepentingan investasi dan promosi daerah”, tegas Sugianto Sabran.

Ditambahkan, dalam menghadapi era globalisasi dimana persaingan semakin ketat maka pemerintah daerah dan pelaku usaha harus melakukan antisipasi dan persiapan antara

lain dengan menjaga mutu dan kualitas produk, meningkatkan efisiensi, desain, pengetahuan dan ketrampilan serta kecintaan dan kesadaran untuk selalu menggunakan produk dalam negeri. “Mulai sekarang Saya menghimbau kita mencintai dan menggunakan produk Indonesia mulai dari pribadi, keluarga, instansi pemerintah dan swasta khususnya produk lokal/bangsa sendiri sehingga kita bangga menggunakan produk negara sendiri”, terang gubernur. \*\*\*





## Gubernur Sugianto Ajak Masyarakat Kalteng Budayakan Gotong Royong



Palangka Raya – Biro PKP. Gotong royong telah menjadi jati diri, karakter dan ciri khas masyarakat serta budaya Bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Semangat gotong royong hendaknya bukan hanya sekadar dalam ucapan, tapi perbuatan nyata. Dengan bergotong royong akan merekatkan seluruh elemen bangsa yang akan memberikan kekuatan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mendorong kemajuan bangsa.

Demikian ditegaskan Gubernur H. Sugianto Sabran saat mencanangkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-16, Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 dan Hari Keluarga Nasional ke-26 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di lokasi Ikon Jelawat Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis pagi (04/04/2019).

Gubernur Sugianto Sabran menegaskan semangat gotong royong jangan hanya dijadikan sekadar slogan atau sebatas kata-kata, namun harus dibuktikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Budaya gotong royong harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, karena gotong royong merupakan kekuatan dan modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menatap masa depan yang lebih baik,” imbuh Sugianto Sabran.

Gubernur mengajak seluruh

masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadikan momen pencanangan BBGRM sebagai refleksi diri akan pentingnya budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. “Marilah kita jadikan momentum pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang kita laksanakan hari ini sebagai wahana untuk mengingatkan dan menanamkan kepada seluruh masyarakat akan arti penting dan manfaat budaya gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat”, ujar gubernur.

Sementara itu Kepala BKKBN RI melalui Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Ahmad Taufik mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan BBGRM 2019 di Sampit ini. “Saya sangat berterima kasih sekali, mengapresiasi sekali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kelihatannya sangat antusias sekali masyarakat di sini”, kata Ahmad Taufik.

Pencanangan BBGRM 2019 di Sampit ini mengangkat tema “Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Keluarga Nasional, Kita Dayagunakan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagai Mitra Pemerintah Desa” dan sub tema “Dengan Falsafah Humas Betang, Mari Kita Gelorakan Budaya Gotong Royong Guna Memperkuat Desa

Melalui Program Kemitraan Kampung KB dan Gerakan Nyata Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, religious, Kuat, Amanah, dan Harmonis).”

BBGRM 2019 di Sampit tersebut dimeriahkan dengan Senam AMIR (Ayo Minum Air) oleh siswa-siswi PAUD se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendapatkan applaus meriah dari undangan yang hadir. Pada kesempatan itu juga dideklarasikan Komitmen Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah se-Kalteng.

Selain itu juga diberikan penghargaan dan hadiah untuk pemenang perlombaan serta penyerahan bantuan stimulan. Rangkaian kegiatan BBGRM 2019 tingkat provinsi Kalimantan Tengah 2019 mulai dilaksanakan tanggal 1 April 2019 dengan beberapa kegiatan sosial di Desa Karang Sari Kecamatan Parenggean seperti Sunatan Masal, Pasar Murah, Pemeriksaan Kanker Servik, Pembuatan KTP dan Kartu Keluarga.

Usai pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2019, Gubernur Sugianto Sabran didampingi Ketua TP PKK Prov. Kalteng Ibu Ivo meninjau stand pameran UMKM Kabupaten dan Kota se-Kalteng. Malam harinya, Gubernur mengadakan Silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pencanangan BBGRM 2019 itu juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Ivo Sugianto Sabran, Wakil Ketua DPRD Provinsi Heriansyah, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Fitri, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah, Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Hamka dan para Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota terkait serta pengurus PKK provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat Kota Sampit.\*\*\*

## **Ketua TP PKK Kalteng Ny.Ivo Sugianto Sabran : Kapasitas Manajemen Kelembagaan PKK Perlu Ditingkatkan**

Palangka Raya – Biro PKP. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari bawah, dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan memberdayakan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta memiliki kesadaran hukum dan peduli terhadap lingkungan.

“Kita patut bangga bahwa di negara ini tidak ada kelembagaan sebesar dan selengkap PKK. Kelembagaan PKK ada di setiap tingkatan mulai dari Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan termasuk Dasawisma yang tersebar di seluruh Indonesia”, beber Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng Ny.Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran di hadapan peserta Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng di Palangka Raya, Selasa (09/04/2019).

Menyadari akan hal tersebut, maka Pengurus dan Organisasi PKK perlu meningkatkan Kapasitas Manajemen Kelembagaan PKK dan Manajemen Program PKK. “Dua aspek manajemen ini menjadi sangat penting karena dinamika pembangunan dan pemerintahan yang terkait dengan fungsi dan peranan Tim Penggerak PKK sungguh berpengaruh terhadap fungsi kinerja Gerakan PKK”, tegas Ivo Sugianto Sabran.

Ny.Ivo Sugianto Sabran juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan peran dan fungsi Dasawisma sebagai ujung tombak pelaksanaan program dan gerakan PKK di tingkat Desa

sehingga akan berpengaruh hingga ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Provinsi.

Pada kelompok-kelompok Dasawisma inilah diharapkan muncul kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat terhadap masalah dan kemungkinan munculnya penyakit yang mengancam dan merugikan masyarakat. “Oleh karena itu saya menghimbau agar menguatkan kembali Dasawisma dan daerah yang belum terbentuk Dasawisma wajib hukumnya untuk sesegera mungkin membentuk Dasawismanya”, jelas Ivo Sugianto Sabran.

Ketua TP PKK Kalteng Ny.Ivo Sugianto Sabran juga menyoroti permasalahan kesehatan yang cukup meresahkan di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah yaitu Gizi Buruk atau Stunting yang perlu ditangani sesegera mungkin dengan intervensi dan kolaborasi lintas sektor termasuk melibatkan peran Dasawisma sangatlah penting.

Dijelaskan, Gubernur Kalimantan Tengah bersama Bupati/Walikota se-Kalteng beberapa waktu lalu di Sampit Kotawaringin Timur telah Mendeklarasikan dan Menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kalimantan Tengah. “Saya berharap Kabupaten dan Kota dapat menindaklanjutinya dengan segera Deklarasi dan Kesepakatan Bersama tersebut agar permasalahan stunting di Kalimantan Tengah dapat diatasi”, ujarnya.

Selain penanganan masalah stunting, Ketua TP PKK Kalteng Ny.Ivo Sugianto Sabran juga mengharapkan pembinaan Posyandu lebih diintensifkan. Ketua TP PKK Kalteng itu

mengungkapkan persentase Posyandu yang aktif atau Posyandu yang mempunyai Strata Mandiri dan Purnama hanya sekitar 19,4 % atau sekitar 503 Posyandu dari 2.587 Posyandu di Kalteng. “Untuk itu saya mengajak seluruh Pengurus dan Anggota PKK Kabupaten/Kota agar bersama-sama meningkatkan keaktifan dan membina Posyandu di daerahnya masing-masing serta menggerakkan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui untuk memanfaatkan Posyandu setiap bulan guna mendapatkan imunisasi dan tumbuh-kembang anak dapat terpantau dengan baik”, imbuhnya.

Sementara itu gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang disampaikan Plh.Sekda Kalteng Supto Nugroho menegaskan kunci sukses Program PKK bukan hanya bermodalkan semangat Ketua Tim Penggerak PKK saja, tetapi juga harus didukung penuh dari pemerintah daerah khususnya para Bupati dan Walikota untuk menciptakan kesamaan serta pemahaman untuk memperkuat jalinan kemitraan dengan pihak terkait. “Harapan saya agar PKK benar-benar bisa mengimplementasikan secara riil program-programnya untuk kesejahteraan keluarga” ujar gubernur.

Pendidikan dan pesan moral harus disampaikan mulai dari kandungan dengan memperhatikan dan memberikan asupan gizi dan makanan yang sehat sampai pada usia sekolah serta memberikan pengetahuan agama, pembinaan karakter dan perhatian terhadap tumbuh-kembang anak. “Kita semua mempunyai peran penting terhadap perkembangan mental dan fisik anak yang dimulai dari orang tua, guru dan lingkungan sekitar kita”, kata gubernur.\*\*\*

## Palangka Raya Juara Umum STQ XXII Tingkat Provinsi Kalteng 2019.

Palangka Raya - Biro PKP. Kafilah Kota Palangka Raya sukses meraih prestasi Juara Umum Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 yang diselenggarakan tanggal 26 sampai dengan 30 April 2019 di Palangka Raya dan berhasil memboyong Piala Bergilir STQ Tingkat Provinsi Kalteng 2019.

Piala Bergilir STQ Tingkat Provinsi Kalteng tersebut diserahkan gubernur H.Sugianto Sabran kepada kepada Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yang kafilahnya berhasil meraih Juara Umum STQ XXII Tingkat Provinsi Kalteng 2019.

Kafilah Palangka Raya sebagai Juara Umum akan mewakili Kalimantan Tengah mengikuti STQ Tingkat Nasional tanggal 26 Juni sampai dengan 7 Juli 2019 di Pontianak Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran ketika menutup STQ Tingkat Provinsi Kalteng 2019 di Lapangan Sanaman Mantikei Palangka Raya, Selasa (30/04/2019) mengharapkan Kafilah Palangka Raya mempersiapkan diri lebih baik lagi sehingga dapat mengharumkan nama daerah Kalimantan Tengah di kancah nasional.

Sugianto Sabran mengatakan setiap Kafilah dalam pelaksanaan STQ selalu ingin meraih prestasi juara. "Namun yang terpenting adalah membina generasi muda Islami menjadi generasi yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia", tutur gubernur.

Gubernur Sugianto Sabran menegaskan Kalimantan Tengah berkeinginan menjadi tuan rumah STQ Nasional dan keinginan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Agama RI. Diharapkan Kalimantan Tengah

pada tahun mendatang dapat ditetapkan sebagai tuan rumah STQ Nasional.

Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalteng 2019 yang diikuti seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalteng itu dimeriahkan dengan pameran dan pasar rakyat di sekitar Jalan AIS Nasution depan SMP I Palangka Raya.

Gubernur menyampaikan selamat kepada Kafilah yang berhasil meraih prestasi sebagai juara dan kepada Kafilah yang belum berhasil meraih prestasi juara agar terus berlatih dengan tekun untuk meraih prestasi terbaik dalam STQ di masa mendatang.

Sugianto Sabran juga menyoroti perkembangan pasca Pemilu serentak di Kalteng yang tidak lepas dari Kerukunan Umat Beragama atau dalam bahasa agama adalah Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Bashariyah. "Kita semua tentu berharap dengan Falsafah Huma Betang dapat menjadi pedoman hidup bagi

terbinanya kerukunan antar umat beragama, khususnya di provinsi Kalimantan Tengah", ujar Sugianto Sabran.

Selain mengajak warga masyarakat agar terus menjaga kerukunan antar umat bergama, juga tidak henti-hentinya menegaskan komitmennya dalam p e m b e r a n t a s a n narkoba.

"Kita selamatkan anak didik kita dari bahaya narkoba dan berantas narkoba secara bersama dengan mengawasi peredaran narkoba di lingkungan rumah tangga, RT/RW, sekolah dan lingkungan sekitar. Masyarakat jangan takut melaporkan kepada aparat TNI/Polri jika mengetahui terjadi penyalahgunaan narkobat di lingkungan masyarakat", tegas gubernur.\*\*\*





H. SUGIANTO SABRAN  
Deputy Minister of Environment, Forestry and Fisheries



FARIZAL FIRRI'S HUR'UM  
Deputy Minister of Environment, Forestry and Fisheries

# RAPAT KOORDINASI DAERAH LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAPTUN 2019

Dalam  
ke

